

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA MISKIN  
di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember**

*The Empowerment of Poor Household Microbusiness in Sucopangepok Village, District  
Jelbuk, Jember Regency.*

Hesty Imaniar Indriati, Anastasia Murdyastuti, Agus Suharsono  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
(UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 *E-mail*: hestongimaniar@gmail.com

*Abstract*

*This research aimed to describe the empowerment of poor household microbusiness in Sucopangepok Village, District of Jelbuk, Jember Regency. The research used qualitative design with descriptive research type. The focus of this research was at the stage of poor household microbusiness empowerment, which is a process of empowerment of poor household microbusiness in poor household microbusiness development program (PUM-RTM) in Sucopangepok Village, District of Jelbuk, Jember Regency. Data used in the research were primary data and secondary data. Informants were determined by purposive technique. Data were collected by observation, interview, documentation, and literature study. Data analysis consisted of data reduction, data display (presentation of data) and conclusion drawing/verification. Data validity was tested by triangulation. The results showed that the implementation of empowerment was undertaken in accordance with the rules although in the field the capital assistance could not be rolled. This was because people considered that the assistance was freely granted, and they did not need to be return it.*

**Keywords:** *empowerment, microbusiness*

## Pendahuluan

Kemiskinan sesungguhnya juga berkaitan dengan empat dimensi kemiskinan lain, yaitu kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi dan ketidakberdayaan...". Salah satu fakta kemiskinan masih banyak ditemui salah satunya Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kabupaten Jember tetap menempatkan pengentasan kemiskinan pada prioritas utamanya dalam menghadapi kondisi kemiskinan. Selain itu, langkah ini juga sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan pembangunan nasional, yang sejak awal tahun 2000 mengadopsi konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh PBB berupa target bersama 184 negara (Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember, 2005:1).

Dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi MDGs pada pembangunan manusia, maka pembangunan di Kabupaten Jember melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dibuktikan pada tujuan diadakannya otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah: "mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Berdasarkan tujuan otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pembangunan daerah melalui otonomi daerah, dimana salah satunya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (*choices*) yang dapat dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2007:9). Merespon kondisi dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dari golongan pengusaha mikro tersebut, maka Dinas Koperasi dan UMKM membuat suatu inovasi yaitu program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM). Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 518/1156/463.313/2005 tentang petunjuk teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:2).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jelbuk, tepatnya di desa Sucopangepok karena di desa tersebut terdapat 4 LKMM, diantaranya 2 masih aktif dan 2 LKMM lainnya mengalami rugi yaitu LKMM Nurul Hidayah dan Nurul Huda. Maka,

peneliti akan terfokus pada LKMM yang hanya terdapat di desa Sucopangepok saja. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa masalah kemiskinan dapat diatasi bila pelaksanaan pembangunan tepatnya melalui pemberdayaan mampu dikelola dengan baik. Maka, peneliti ingin mengungkap lebih mendalam tentang bagaimana pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin dalam mengatasi masalah kemiskinan sehingga masyarakat lebih berdaya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendapat tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah “Bagaimana pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?”

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai

andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah (dalam Tangkilisan, 2003: 2).

Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan

suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

### **Pemberdayaan**

Suharto (2005:54) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan pun tidak dapat terjadi dengan cara apapun. (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas.

Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas struktur sosial yang tidak adil).

Pemberdayaan bertujuan untuk membentuk kemandirian pada masyarakat yang berkecukupan kemampuan yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian pada masyarakat. Pemberdayaan berlangsung secara bertahap dalam membentuk kemandirian agar dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik serta dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

## Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

## Usaha Mikro

Karakteristik usaha mikro secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat informal dan tidak berbadan hukum
- b. Bersifat fluktuatif baik dari segi omzet maupun tenaga kerja.
- c. Tanpa atau hanya menggunakan teknologi sederhana. Teknologi yang termasuk tinggi yang digunakan dalam usaha mikro antara lain mesin jahit dan mesin bubut logam.
- d. Pelaku usaha mikro relatif mudah berganti jenis usaha. Keluar masuknya usaha mikro relatif mudah karena usaha ini tidak memerlukan perijinan formal, modal usaha yang dibutuhkan relatif kecil, serta tidak memerlukan keahlian khusus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar suatu usaha dapat digolongkan sebagai usaha mikro apabila usaha tersebut bersifat informal, modal yang digunakan terbatas, tidak memerlukan keterampilan dan keahlian khusus serta teknologi yang dipergunakan masih sederhana. Usaha mikro yang dimaksud ini adalah usaha mikro yang diperuntukkan untuk rumah tangga miskin. Usaha mikro RTM (Rumah Tangga Miskin) adalah “usaha perseorangan dan atau usaha kelompok yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang bergerak disektor [*sic*] perdagangan dan jasa serta usaha produktif lainnya, yang tergabung dalam Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM)” (Pemerintah Kabupaten Jember, 2007:9).

## Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin

Program PUM-RTM merupakan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi yang berbasis pada penguatan institusi. Program yang digagas Dinas Koperasi UMKM ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 518/1156/463.313/2005 tentang petunjuk teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:2).

Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya 2 institusi yaitu institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat) dan

institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat). Institusi social yang bernama Pokmas ini, penjelasannya sebagai berikut. “Pokmas-RTM atau kelompok Rumah Tangga Miskin adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara bekerja sama dalam kelompok dan menguatkan anggota kelompok, beranggotakan maksimal 5 (lima) orang ibu-ibu rumah tangga miskin dalam suatu wilayah tertentu berdomisili berdekatan dengan antar anggota yang satu dengan anggota lainnya” (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:14).

### Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan sesuai dengan PTO, meski dilapangan ternyata bantuan permodalan ini tidak bisa bergulir. Hal ini salah satunya diakibatkan karena karakter masyarakat yang menilai bahwa bantuan ini cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan.

### Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahapan Penguatan Institusi

Pada tahap ini kegiatannya adalah mencari tokoh masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi, kemudian tokoh tersebut dibekali untuk kemudian dijadikan kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas kemudian dibentuk dan dibekali berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan. Pokmas ini kemudian melakukan rembuk untuk mengkaji kemiskinan yang dialami masyarakat, setelah mengetahui penyebab kemudian mencoba mengatasi kemiskinan dengan potensi wilayah yang dimiliki desa atau dusun. Hal ini diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Kemudian pokmas diajari pelatihan usaha mikro, mulai dari proses penyediaan bahan mentah hingga selling, pembukuan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembentukan LKMM, lembaga ini nantinya yang akan menyediakan modal bantuan kepada rumah tangga miskin sesuai dengan ketentuan, sehingga Pengurus LKMM dibekali dengan sejumlah pengetahuan. Pembekalan juga dilakukan kepada pokmas berkaitan dengan kewirausahaan, hingga pengelolaan modal.

#### 2. Tahapan Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan

Pihak operasi menugaskan petugas teknis untuk medampingi kegiatan pemberdayaan, selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha, perguliran dana, dan peningkatan pendapatan RTM seperti kegiatan admistrasi, membuat laporan, memasukkan dalam neraca dan sebagainya.

### 3. Tahapan Bantuan Permodalan

Bantuan permodalan merupakan bagian penting yang berguna sebagai penggerak dalam program ini. Setelah para anggota pokmas mendapat pembekalan seperti tentang pemanfaatan peluang usaha, peningkatan keterampilan, hingga cara pengelolaan bantuan permodalan maka bantuan ini akan melengkapi pemberdayaan yang mereka terima sebelumnya dengan menggunakan dana yang mereka dapatkan. Meskipun begitu, tentunya untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut mereka masih memerlukan pengurus LKMM sebagai pihak yang berwenang dalam penyaluran pinjaman ini.

### Kesimpulan

Pelaksanaan program tersebut, masih terdapat fenomena yang ada dalam perkembangan dana. Pada umumnya, dananya masih dalam bentuk hadiah atau *charity*, sehingga pengembangan usaha kurang maksimal dan cenderung tidak teralokasi optimal. Seperti kita ketahui bahwa permasalahan terbesar dari usaha mikro kecil dan menengah, selama ini adalah sulitnya mereka untuk mendapatkan modal usaha yaitu *start up Capital* atau modal awal, kesulitan memperoleh bahan baku yang berkualitas, keterbatasan teknologi dan

sumberdaya Manusia (SDM), khususnya kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) termasuk manajemen dan pemasaran. Serta bantuan permodalan ini tidak bisa bergulir. Hal ini salah satunya diakibatkan karena karakter masyarakat yang menilai bahwa bantuan ini cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan.

### Saran

Penulis memberikan saran kepada pelaksana program agar pada kegiatan pemberdayaan atau bentuk lainnya perlu mengedepankan kehati-hatian agar program tepat sasaran agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Sehingga dana bantuan bisa bergulir untuk digunakan pada kelompok atau anggota yang lain.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Badan Pusat Statistik. 2011. *Jawa Timur Dalam Angka*. Jakarta : BPS

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2005. *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin*. Jember.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2005. *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Kabupaten Jember*. Jember.

- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2007. *Petunjuk Teknis Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Sub Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin*. Jember.
- Korten, David C. dan Sjahrir. 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rais, M. Amien. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: ditya Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabes
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Surjono, A. dan Nugroho T. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. JMPK. Vol. 08/03/September. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Universitas Diponegoro.
- Suyanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember.

## Surat Keputusan

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 518/1156/463.313/2005 tentang petunjuk teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM).

## Internet

Ant/BEY. 2010. *Jember Berpenduduk Miskin Terbesar di Jatim*. Nusantara/Rabu 10 Maret 2010. <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/10/12528/Jember-Berpenduduk-Miskin-Terbesar-di-Jatim> (diakses 20 Oktober 2012).

